



**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS RENCANA AKSI DAN
TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PROGRAM KEKAYAAN INTELEKTUAL**

2024



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.-01.OT.01.01 TAHUN 2024.....	3
PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH TAHUN 2024.....	7
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL TAHUN 2024.....	31
1. ONE VILLAGE ONE BRAND (OVOB) TAHUN 2024.....	45
2. Penguatan Kapasitas Pengelola (Operator) Sentra / Klinik Kekayaan Intelektual (MPP/Perguruan Tinggi/Lembaga Litbang).....	47
3. Inventarisasi Data KIK yang Memiliki Nilai Ekonomi dengan Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait KIK.....	51
4. RUKI GOES TO SCHOOL.....	54
5. Pemetaan Potensi Permohonan Desain Industri di Wilayah 2024....	56
6. Patent One Stop Services.....	66
7. Penelusuran dan Pemanfaatan Informasi Paten.....	69
8. Drafting Paten.....	71
9. Pencegahan Tindak Pidana Kekayaan Intelektual di Wilayah.....	73

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.-01.OT.01.01 TAHUN 2024**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.-01.OT.01.01 TAHUN 2024

Catatan pelaksanaan pelaporan :

- Pelaporan melalui <http://kinerja.kemenkumham.go.id/>
- Pelaporan dilaksanakan setiap bulannya sesuai dengan jadwal yang ditentukan
- Pelaksanaan verifikasi pelaporan dilaksanakan setiap triwulan dengan mekanisme *hybrid*, dengan verifikator merupakan masing-masing satuan kerja eselon II DJKI terkait,

NO	ISU PERMASALAHAN	IMPLEMENTASI		HASIL	PENANGGUNG JAWAB
1	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi Geografi	Januari – Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan pemerintah daerah (dinas terkait) memetakan potensi IG yang ada di wilayah 2. Inventarisasi produk IG terdaftar yang ada di wilayah setempat 3. Identifikasi Pihak – pihak yang terkait dengan Penguatan kelembagaan dan pengawasan Indikasi Geografis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Koordinasi 2. Daftar inventarisasi produk IG 3. Daftar pihak-pihak terkait 	Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

		April - Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan pendampingan kepada pemohon, dinas atau pemda setempat terkait dengan produk yang akan diajukan atau sedang dalam proses 2. Terbentuknya Pokja Penguatan kelembagaan dan pengawasan IG (Pokja Pengawasan IG) di daerah melalui SK yang ditandatangani oleh Kakanwil/ Gubernur 3. Menyusun Pedoman dan Standar Pengawasan IG di Daerah dengan Berkoordinasi pemerintah daerah (dinas terkait), atau stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Koordinasi 2. SK Pokja per wilayah 3. Dokumen Pedoman dan Standar Pengawasan IG 	
		September November	Pengajuan permohonan Indikasi Geografis baru dan atau menyelesaikan minimal permohonan Indikasi Geografis yang masih dalam proses	Bukti permohonan pendaftaran Indikasi Geografis	
		Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan pemda setempat terkait dengan potensi IG yang dapat diajukan permohonannya di tahun 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Koordinasi dan daftar potensi IG tahun 2025 	

			2. Tindak lanjut Pokja yang sudah terbentuk	2. Laporan Tindak Lanjut Pokja	
--	--	--	---	--------------------------------	--